SIARAN PERS



Reformasi Tata Kelola Pelabuhan, Sistem Digital Sudah Berlaku di 246 Pelabuhan Indonesia

Admin -- 04 July 2024

Jakarta, 04 Juli 2024 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terus mendorong perbaikan tata kelola pelabuhan di Indonesia, sebagai upaya mencegah terjadinya korupsi dan mendorong terciptanya pelayanan yang optimal. Pada aksi 2022 – 2023 upaya tersebut diantaranya menerapkan digitalisasi di 14 pelabuhan utama, dan di 2023-2024, digitalisasi pelabuhan ini telah meluas ke total 246 pelabuhan.

“Dari 246 itu, 46 di antaranya adalah pelabuhan prioritas nasional dalam transaksi ekspor dan impor yang mencakup coverage nasional. National Logistic Ecosystem (NLE) juga telah diterapkan di lebih dari 2000 terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Hasilnya, proses layanan pelabuhan menjadi lebih cepat dan lebih murah,” ucap Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam Diskusi Media terkait upaya

perbaikan tata kelola pelabuhan yang dilakukan oleh STRANAS PK di Ruang Konpers Gedung Merah Putih KPK, Selasa (02/07).

Penerapan NLE juga meluas di 6 pelabuhan udara yaitu Bandara Internasional Kualanamu Medan, Soekarno–Hatta Tangerang, Juanda Sidoarjo, Ngurah Rai Denpasar, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan Hasanuddin Makassar yang mencakup 96% kegiatan ekspor dan impor secara nasional. Capaian tersebut berpengaruh terhadap biaya logistik secara nasional yang mengalami penurunan dari 24% menjadi 14,29% berdasarkan riset yang dilakukan oleh Bappenas.

Pahala melanjutkan, dari sisi waktu layanan barang yang sebelumnya memakan waktu 2 minggu, kini rata-rata hanya 20,8 jam. Selain itu, dari sisi biaya penanganan cargo di pelabuhan terjadi efisiensi 46,1%. Dampak selanjutnya pada layanan kapal yang mencapai efisiensi waktu layanan 21,6% dengan dwelling time rata-rata 2,9 hari. Efisiensi lainnya juga terjadi pada biaya layanan kapal 45,5% lebih murah dari biaya sebelum adanya digitalisasi.

“Secara singkat 18 kementerian dan lembaga (K/L) telah bekerjasama mencapai digitalisasi pelabuhan pemerintah dan digitalisasi di pelabuhan swasta. Sekarang kita bisa memonitor pergerakan barang di 246 pelabuhan dan 2000 pelabuhan swasta, paling tidak kuantitasnya apa. Capaian lainnya 16 pelabuhan udara dari kecepatan layanan 2 hari, sekarang hanya 3 hingga 4 jam sudah tercapai. Digitalisasi ini tercapai juga atas bantuan LNSW,” papar Pahala.

LNSW Integrasikan Sistem Antar K/L

Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia menyebutkan, banyaknya kegiatan di pelabuhan melibatkan 18 K/L, sehingga digitalisasi penting dilakukan dalam tata kelola pelabuhan. Menurut Oza, lembaga yang dipimpinnya berperan mengelola integrasi sistem antar kementerian dan lembaga terkait proses ekspor, impor dan logistik.

“Kita memang mencoba memperbaiki tata kelola di pelabuhan dengan melakukan integrasi sistem 18 K/L yang memiliki kewenangan di pelabuhan tanpa mengurangi kewenangan tersebut. Kita buat proses bisnisnya lebih simpel, kita manfaatkan teknologi digital sehingga semua berjalan lancar dan waktunya lebih efisien serta pastinya akan mengurangi biaya. Artinya digitalisasi dan integrasi proses tidak hanya di K/L, kami juga menghubungkan dengan BUMN, kami juga menghubungkan dengan private sector,” jelas Oza.

Hal yang sama juga disampaikan Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono. Dia menyebut dengan adanya digitalisasi di pelabuhan, proses yang berkaitan dengan barang jadi jauh lebih baik. ”Semuanya dikontrol dari sistem. Bagaimana memperpendek port stay sehingga pada akhirnya kapasitasnya bisa naik. The beauty of transformation adalah meningkatkan kapasitas tanpa investasi yang berlebih bahkan kadang-kadang tanpa investasi,” katanya.

Proses digitalisasi pelabuhan juga memberikan dampak pada penerimaan Negara untuk sektor K/L yang memiliki layanan jasa kepelabuhanan. Pada PNBP Kementerian Perhubungan dengan unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui penerapan Inaportnet dari Tahun 2021-2023 sejak aksi reformasi pelabuhan berlangsung, meningkat 116,05% sebesar 4,278 Triliun Rupiah.

Hingga 15 bulan pelaksanaan aksi 2023-2024 (B15), Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan meraih capaian tertinggi (63,64 %). Tujuan aksi ini meningkatkan layanan pelabuhan dengan menyederhanakan proses bisnis dan tata kelola kelembagaan di pelabuhan sehingga dapat memberi kepastian waktu layanan dan mengurangi tingginya biaya logistik di pelabuhan.

Perkembangan Aksi pelabuhan lainnya yaitu Informasi Layanan Manifest Domestik oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan. Tujuannya, untuk transparansi dan memperoleh data distribusi komoditas sebagai upaya mencegah penimbunan oleh oknum yang mengakibatkan kelangkaan.

Pada diskusi media ini turut hadir stakeholder di pelabuhan Rifani Kasubdit Lalu Lintas Luar Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Chotibul Umam Kasubdit Impor Direktorat Jenderal Bea Cukai, Achmad Farchanny Direktur Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Ikhwandi dari Badan Karantina Indonesia dan Iwan dari Imigrasi.

Survei Efektivitas Layanan National Logistic Ecosystem (NLE) Tahun 2023

Survei Efektivitas Layanan NLE tahun 2023 dilakukan oleh Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) di 14 pelabuhan nasional, dengan sampel populasi sebanyak 1.393 responden.

Hasil survei menunjukkan terjadinya efisiensi waktu dibandingkan dengan proses sebelumnya pada layanan delivery order (DO) online sebesar 40.3%, surat penyerahan peti kemas (SP2) online sebesar 47.0%, SSm Quarantine Customs (QC) sebesar 73.4%, SSm Pengangkut sebesar 21.6%, dan SSm Perizinan sebesar 56.4%.

Selain penghematan waktu, terjadi pula penghematan biaya pada layanan delivery order (DO) online sebesar 25.7%, surat penyerahan peti kemas (SP2) online sebesar 32.4%, SSm Quarantine Customs (QC) sebesar 46.1%, SSm Pengangkut sebesar 45.5%, dan SSm Perizinan sebesar 97.8%.

Penilaian efisiensi tersebut mengikutsertakan testimoni para pengguna layanan yang menyatakan layanan NLE membantu perusahaan bekerja lebih efektif dan efisien, secara waktu dan biaya.